

## BAB III

### GAMBARAN UMUM DEWAN MASJID INDONESIA

#### A. SEJARAH DAN LATAR BELAKANG BERDIRINYA DEWAN MASJID INDONESIA (DMI)

Sejarah Dewan Masjid Indonesia dimulai dari sebuah nama yang tidak dikenal sebelumnya, yaitu Al-Ma'rifat. Karena Al-Ma'rifat hanyalah sebuah masjid kecil, sederhana, yang terselip diantara rumah-rumah di jalan Lembang Jakarta Pusat. Namun di masjid itulah pada suatu hari dalam tahun 1970 tercetus gagasan dari beberapa Jendral Senior dan pemuka-pemuka masjid untuk mendirikan sebuah badan yang diharapkan dapat membawa angin segar bagi perjuangan umat Islam. badan ini merupakan suatu wadah yang menampung masjid-masjid dan organisasi-organisasi kemasjidan terutama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan perbedaan paham diantara mereka.

Gagasan itu dengan seketika didukung oleh segenap jama'ah, termasuk pengurus tempat-tempat ibadah dalam lingkungan Angkatan Bersenjata. Ternyata ide ini juga merupakan cita-cita yang sudah lama diharap-harapkan oleh kaum muslimin dan muslimat, sehingga dalam tempo yang singkat mengalir sambutan dari tokoh-tokoh umat Islam, muballigh-muballigh, pengurus-pengurus masjid di Jakarta serta pimpinan organisasi-organisasi kemasjidan. Sesudah memulai perbincangan yang cukup matang dan usaha-usaha tak kenal lelah, akhirnya gagasan itu terealisasi pada tanggal 30 Desember 1970 dalam

suatu pertemuan yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada waktu itu, Bapak H. Rus'an. Warna dari wadah itu sudah jelas, yakni badan kerja sama masjid-masjid tanpa mempermasalahkan identitas dan cara ibadah masing-masing ke arah terwujudnya Ukhuwah Islamiyah dalam rangka pembinaan kerukunan hidup beragama di Indonesia.

Tersusunlah kemudian Panitia Persiapan Pembentukan Dewan Kemakmuran Masjid seluruh Indonesia yang diketuai oleh KHMS. Rahardjodikromo. Pertemuan-pertemuan dan konsultasi-konsultasi terus dilakukan dengan IMAMI (Ikatan Masjid dan Musholla Indonesia), IMD (Ikatan Masjid Djakarta) yang kemudian menjadi IKMI (Ikatan Masjid Indonesia), PERMI (Persatuan Masjid Indonesia), Dewan Kesejahteraan Masjid (Jabar), Dewan Kemakmuran Masjid Aceh dan BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) yang berada dibawah Departemen Agama. Disamping itu juga dilakukan pertemuan dengan pengurus-pengurus masjid seluruh Jakarta bertempat di masjid Agung Sunda Kelapa untuk Jakarta Pusat, masjid Agung Al-Husna untuk Jakarta Utara, masjid Agung Al-Azhar untuk Jakarta Selatan, masjid Muhlisiin untuk Jakarta Barat dan di masjid Agung At-Taqwa untuk Jakarta Timur.

Diantara kerja kepanitiaan ialah membentuk Dewan Formatur pada tanggal 16 Juni 1972. Dewan ini akhirnya menyelesaikan penyempurnaan Anggaran Dasar pada tanggal 20 Juni 1972, dan kemudian pada tanggal 22 Juni 1972 Dewan Kemakmuran Masjid seluruh Indonesia dinyatakan berdiri dengan singkatan nama Dewan Masjid.

Menyusul penyempurnaan struktur organisasi dan susunan personallinya pada tanggal 22 Juni 1972.

Segera Dewan Kemakmuran Masjid Indonesia mengadakan kunjungan kepada Bapak Menteri Agama RI, Dr. H. Mukti Ali untuk memperkenalkan diri. Menteri dengan antusias menyambut Dewan Masjid. Bahkan beliau menyarankan agar Dewan Masjid menyelenggarakan kerjasama yang erat dengan BKM. Atas saran tersebut, Dewan Pimpinan lalu mengadakan pertemuan dengan BKM (K. H. Djazuli Wangsasaputra) pada tanggal 12 Juli 1972 yang menghasilkan beberapa keputusan antara lain bahwa DKM akan mengirimkan pemberitahuan kepada daerah-daerah tentang berdirinya Dewan Masjid, bahwa Dewan Masjid dan BKM akan mengadakan pertemuan rutin minimal 3 bulan sekali.

Selanjutnya atas usaha keras sebuah panitia yang dibentuk oleh pimpinan dengan diketuai oleh Sekjen Dewan Masjid Mayjen Abdul Karim Rasyid, dilangsungkan upacara peresmian Dewan Kemakmuran Masjid seluruh Indonesia di masjid Sunda Kelapa pada tanggal 14 Agustus 1972. Selain menteri Agama RI Prof. Dr. Mukti Ali yang berkenan meresmikan sendiri, hadir pula dalam acara tersebut Gubernur DKI Jakarta, serta tokoh-tokoh agama dan para ulama ibukota.

Sebagai realisasi dari program awal, adalah mencari tempat sekretariat yang representatif. Untuk itu Dewan Masjid segera menyampaikan surat kepada Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 11 September 1972, meminta agar gedung eks Sekretaris MPRS RI dapat dipakai sebagai tempat ibadah dan kantor Dewan Masjid. Permintaan ini

dikabulkan oleh Gubernur melalui suratnya tertanggal 27 September 1972. Dengan demikian Dewan Masjid yang baru berusia kurang dari 2 bulan itu telah mempunyai tempat ibadah/masjid yang sekaligus sebagai kantornya di Jalan Taman Cut Mutiah Nomor 1 Jakarta Pusat. Kemudian, untuk lebih memperlancar jalannya roda organisasi, pimpinan Dewan Masjid membentuk Yayasan Dewan Kemakmuran Masjid pada tanggal 22 Desember 1972 dengan Akte Notaris Ofrip Suwondo, SH Nomor 28. Dengan akte tersebut maka Dewan Kemakmuran Masjid seluruh Indonesia mempunyai tempat berpijak yang kuat, apalagi setelah memperoleh persetujuan Gubernur DKI Jakarta berupa badan hukum pada tanggal 1 Maret 1973.

#### B. PERAN DEWAN MASJID INDONESIA DI AWAL MASA PERTUMBUHAN

Setelah tampak nyata bahwa organisasi berniat maju dengan sungguh-sungguh bagi kepentingan umat Islam serta bagi kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya, maka pada tanggal 14 Robiul Awwal atau 24 Mei 1975, Pimpinan Pusat Dewan Masjid diwakili oleh 6 orang pengurus intinya, diketuai oleh Letjen H. Soedirman telah menghadap Presiden Soeharto untuk meminta restu dan sarannya. Dalam kesempatan itu Presiden Soeharto berkenan menyampaikan sambutan baiknya kepada Dewan Masjid, bahkan beliau mengharapkan agar terbentuknya Majelis Ulama Indonesia.

Harapan ini dilaksanakan oleh Dewan Masjid dengan menghadap Menteri Agama RI pada tanggal 2 Mei 1975 disusul dengan mengirimkan sebuah surat pada tanggal 19 Juli 1975 berisikan saran-saran tertulis

tentang apa dan bagaimana seharusnya Majelis Ulama Indonesia yang akan didirikan itu.

Selanjutnya Dewan Masjid mengirimkan 4 orang pengurusnya, yakni H. Soedirman, KHMS. Rahardjodikromo, KHM. Hasjim Adnan, KH. Hasan Basri, untuk duduk didalam Majelis Ulama Masjid Indonesia Pusat, dan secara aktif Pimpinan Dewan Masjid tersebut telah melaksanakan kunjungan ke daerah-daerah dalam meresmikan serta mengembangkan Majelis Ulama Indonesia.

Disamping itu telah dilakukan hubungan internasional dengan Badan Keagamaan Dunia, antara lain ; (1) Hubungan surat-menyurat dengan organisasi Islam Pakistan yang telah mengirimkan buku-buku yang berisikan ajaran-ajaran Islam, (2) Dengan WCRP (World Conference On Religion and Peace) di New York sehingga Sekretaris Jenderal Organisasi Dunia itu Dr. Homer Jack, telah melakukan kunjungan dan pertemuan dengan Pimpinan Dewan Masjid Indonesia di kantor sekretariat Dewan Kemakmuran Masjid seluruh Indonesia.

### C. MASA PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN DEWAN MASJID INDONESIA (DMI)

Setelah Dewan Masjid Indonesia resmi berdiri dengan latar belakang dan sejarah tersebut di atas, maka perkembangan selanjutnya dari organisasi ini dapat diuraikan dalam 3 periode.

#### 1. Periode Pertumbuhan (1972-1975)

Dalam periode ini pengurus lebih menitik beratkan pada segi memperkenalkan dan memasyarakatkan Dewan Masjid di dalam dan luar negeri dengan melakukan usaha-usaha antara lain :

- a. Penyebarluasan informasi tentang Dewan Masjid ke daerah-daerah di seluruh Indonesia melalui surat menyurat, mass media (surat kabar, radio, TV, dan lain-lain), penerbitan Bulletin dan almanak, serta mengadakan kunjungan ke daerah-daerah.
- b. Mengadakan pertemuan dan silaturahmi dengan para pejabat pemerintah seperti menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, Gubernur DKI Jakarta dan lain-lainnya. Disamping untuk berkenalan juga untuk mendapatkan bantuan dan kerjasama.
- c. Mengadakan pertemuan dengan organisasi Islam dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memperkenalkan Dewan Masjid, silaturahmi dan berkonsultasi.
- d. Mengusahakan adanya kantor / sekretariat Dewan Masjid Indonesia sebagai pusat kegiatan organisasi, pengadaan sarana dan staf sekretariat. Atas bantuan Gubernur DKI Jakarta H. Ali Sadikin mendapatkan tempat di Jalan Cut Mutiah Nomor 1 (bekas sekretariat MPR) yang sekarang menjadi masjid Cut Mutiah. Selanjutnya atas bantuan menteri Agama bertempat di masjid Istiqlal.
- e. Membentuk Yayasan Dewan Kemakmuran Masjid (Akte Notaris Oerip Soewondo, SH No. 28 tanggal 22 Desember 1972) sebagai upaya untuk memperlancar jalannya organisasi dengan landasan yang kuat.
- f. Bekerjasama dengan Koordinator Dakwah Islam (KODI) DKI Jakarta mengadakan Pengurus Masjid DKI Jakarta pada bulan Oktober 1974.

Musyawarah menghasilkan beberapa keputusan antara lain tentang Idarah Masjid, Idarah Jama'ah, Idarah Kekayaan dan Administrasi Keuangan, Idarah Bangunan dan Idarah Pemeliharaan yang telah diterbitkan dalam "Idarah Masjid".

- g. Mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi Islam di Pakistan dan World Conferencion Relegion And Peace New York dalam segi tukar-menukar informasi tentang masjid dan keglatan keagamaan.
- h. Memberi sumbangan fikiran kepada pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Perkawinan.

## 2. Periode Perkembangan (tahun 1974-1981)

Guna mengembangkan organisasi dan memperluas ruang lingkup jangkauannya, dalam periode ini diusahakan beberapa langkah keglatan Dewan Masjid Indonesia, antara lain :

- a. Mengadakan kunjungan kepada Bapak Presiden pada tanggal 24 Mei 1975 untuk bersilaturahmi, memohon petunjuk dan bantuan. Dalam kesempatan itu Bapak Presiden menyambut baik atas adanya Dewan Masjid dan mengharapkan agar Dewan Masjid menyumbangkan fikiran bagi pembentukan Majelis Ulama khususnya dan pembangunan masyarakat umumnya.
- b. Mengadakan kunjungan silaturahmi kepada Menteri Dalam Negeri, H. Amir Machmud (tanggal 23 Mei 1975). Menteri menyatakan kesediaan untuk membantu dalam pembentukan Dewan Masjid Daerah.

- c. Mengikuti secara aktif dalam pembentukan Majelis Ulama Indonesia (Juli 1975).
  - d. Mengadakan hubungan kerjasama dalam Rabitah alam Islami di Makkah Al-Mukarramah dengan - mengirimkan data-data tentang masjid dan organisasi kemasjidan.
  - e. Bekerjasama dengan dakwah Islamiyah dengan Organisasi Islam di Kualalumpur dan Singapura tahun 1976 yang terus berkelanjutan sampai tahun 1980.
  - f. Untuk ikut menjernihkan suara-suara negatif dari luar negeri tentang perkembangan Islam di Indonesia, bekerjasama dengan Departemen Agama pada tahun 1978 menerbitkan majalah Islam in Indonesia Today, edisi Arab-Inggris yang dikirim ke luar negeri terutama negara-negara Arab.
  - g. Untuk membantu dan memperkuat kedudukan surat keputusan Menteri Agama No. 70 dan 77 tahun 1978 yang mendapat reaksi negatif dari kalangan tertentu, Dewan Masjid mengeluarkan pernyataan dukungan atas keputusan tersebut.
  - h. Dalam rangka memperkokoh eksistensi organisasi agar menjadi anggota Dewan Masjid Dunia yang berpusat di Makkah Al-Mukarramah, Dewan Masjid Indonesia melakukan penyempurnaan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan pengurusnya.
3. Periode Konsolidasi/Pemantapan (1981-1984)

Pada bulan Desember 1980, Dewan Masjid Indonesia secara resmi menjadi anggota Dewan Masjid se-Dunia. Guna meningkatkan



pengembangan dan lebih memantapkan organisasi, telah dilakukan berbagai usaha antara lain :

- a. Bekerjasama dengan Kanwil Departemen Agama ( dalam hal ini BKM ) menyelenggarakan Musyawarah Kerja Dewan Masjid Indonesia pada bulan Januari 1981 yang diikuti oleh Pimpinan Dewan Masjid Daerah Tingkat I, unsur Departemen Agama, Organisasi Islam dan dihadiri pula oleh Delegasi dari Dewan Masjid se-Dunia. Hal yang dicapai dari Musyawarah Kerja tersebut antara lain :
  - 1). Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Masjid Indonesia.
  - 2). Penyempurnaan Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI).
  - 3). Memantapkan hubungan Organisasi dengan Dewan Masjid Daerah.
  - 4). Lahirnya Panca Program Dewan Masjid Indonesia yaitu : menerbitkan sarana komunikasi, menyelenggarakan siaran radio Dewan Masjid, menyebarluaskan buku Idarah Masjid, memperglat riset, pembinaan khatib, Imam, pengurus masjid dan para muballigh serta mempersiapkan kader muballigh.
- b. Pembinaan perkantoran di masjid Istiqlal Jakarta termasuk personalia staf sekretariat guna meningkatkan volume kegiatan Dewan Masjid Indonesia.
- c. Melakukan pelantikan Pengurus Dewan Masjid Daerah Tingkat I seluruh Indonesia dan menggalakkan pembentukan Dewan Masjid Daerah Tingkat II.

- d. Mengadakan pertemuan dengan para menteri dan Ormas-ormas Islam untuk lebih mengakrabkan tali silaturahmi dan memperluas hubungan kerjasama terutama dalam bidang kemakmuran masjid.
- e. Menjelang sidang umum MPR bulan Maret 1983, Dewan Masjid mengeluarkan pernyataan usulan agar Jenderal Purnawirawan Soeharto dipilih kembali sebagai Presiden Mandataris MPR untuk Periode 1983-1988 demi kesinambungan pembangunan bangsa dan negara.
- f. Menjadi perintis Shohibul Bait dalam pembentukan Dewan Masjid Asia dan Laut Tengah (DEMALT) dan peran serta dalam, "Muslim Scholars Congress on Development, Health and Population".
- g. Mengintensifkan pengelolaan perkantoran, Rapat Pimpinan Harian dan Rapat Pleno guna membicarakan berbagai masalah yang kaitannya dengan ruang lingkup Dewan Masjid mengenal keagamaan dan kemasyarakatan terutama kegiatan kemasjidan.
- h. Menyadari keberadaan Dewan Masjid Indonesia di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila maka atas kesepakatan pendapat dan saran semua pimpinan organisasi-organisasi inti pendukung Dewan Masjid Indonesia, pada tanggal 9 Desember 1983 dengan keputusan rapat pleno yang diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 1983, Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia telah mengirimkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia tentang diterimanya Pancasila sebagai azas tunggal organisasi Dewan Masjid Indonesia sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut.

Keputusan tentang diterimanya Pancasila sebagai azas DMI, dilandasi pandangan dan wawasan yang mendalam dan bijaksana, tanpa mengingkari dasar dan aqidah perjuangan Dewan Masjid Indonesia dalam bidang kemasjidan yaitu Islam yang bertumpu pada Alqur'an dan Sunnah, bahwa dalam wadah negara Pancasila Organisasi Dewan Masjid Indonesia dan masjid-masjid telah dapat dan akan makin berkembang dengan pesat dari segi kemakmuran, idarah dan aktivitas-aktivitas lainnya.

#### D. DEWAN MASJID INDONESIA DAN DAKWAH ISLAM

Sebagai salah satu organisasi Islam, Dewan Masjid Indonesia senantiasa melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan umat Islam dan dakwah. Diantara kegiatan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Panca Program Dewan Masjid Indonesia dan telah dijabarkan dalam usaha operasional dalam bentuk kegiatan khusus, antara lain :

1. Pembangunan Masjid - masjid di daerah transmigrasi, pemukiman baru, perumnas dan tempat-tempat lain yang terkena bencana alam seperti akibat bencana Galunggung dan lain-lain.
2. Pembagian 100.000 Al-Qur'an bantuan Rabithah Alam Islami kepada masjid-masjid di seluruh Indonesia melalui Dewan Masjid Daerah.
3. Penerbitan majalah bulanan berkala (bernama Panggilan Masjid) sebagai media komunikasi di dalam dan luar negeri.
4. Menyelenggarakan seminar tentang idarah masjid, ketahanan masjid, ta'mirul masjid dan arsitektur masjid.

5. Mencetak 60.000 almanak / kalender yang semula ditujukan untuk pemupukan dana, tetapi mengalami kegagalan dalam pemasarannya di daerah-daerah.
6. Menggalakkan pembentukan koperasi-koperasi masjid yang sampai sekarang ini baru sampai pembuatan kertas kerja.

#### E. PERKEMBANGAN SETELAH MUKTAMAR 1984 HINGGA SEKARANG

Muktamar pertama Dewan Masjid Indonesia telah diselenggarakan pada tanggal 23-26 Juli 1984 dengan aman, tertib dan dalam suasana musyawarah, dan salah satu keputusan yang terpenting adalah menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas Organisasi Dewan Masjid Indonesia, disamping telah memilih Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam perkembangannya setelah muktamar 1984, DMI semakin banyak berperan dan berhasil merealisasikan program-programnya secara lebih baik. Diantara program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setelah muktamar 1984 yakni :

1. Mengadakan pelantikan - pelantikan Pengurus Wilayah di seluruh Indonesia.
2. Mengadakan penataran P4 di seluruh Indonesia.
3. Mengadakan kerjasama dengan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila dalam rangka pembangunan masjid di pemukiman transmigrasi dan perumahan di seluruh Indonesia.
4. Mengeluarkan pernyataan usulan yang disampaikan kepada MPR RI, agar sidang umum MPR bulan Maret 1988 memilih dan mengangkat

kembali Jenderal Soeharto menjadi Presiden RI mandataris MPR untuk masa bakti 1988-1993.

5. Menerbitkan buku Pedoman Mimbar Masjid yang dicetak oleh Departemen Penerangan dan Yayasan Haji Mas Agung dan telah disebarluaskan ke seluruh Indonesia.
6. Menyampaikan sumbangan pikiran kepada Presiden melalui Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-Undang Pendidikan Nasional.
7. Membentuk Lembaga Dana Pembangunan Umat.
8. Membentuk koperasi masjid seluruh Indonesia yang sekarang sedang berjalan.